

## REFLEKSI TEOLOGIS TENTANG REKONSILIASI SEBAGAI TUJUAN RESOLUSI KONFLIK

FERRY YANG

### PENDAHULUAN

Ketika saya masih anak-anak, saya selalu diajar untuk berekonsiliasi dengan siapapun saya berkonflik, entah dengan saudara, saudara sepupu, ataupun dengan teman. Orang tua saya, orang-orang yang dituakan, guru-guru, semua mengajarkan untuk berjabat tangan dengan siapapun saya berseteru, sebagai simbol rekonsiliasi, tanpa upaya mengejar kebenaran. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari kerusakan yang lebih jauh dan untuk memelihara kedamaian. Di sisi lain, kebenaran hanya dikejar dengan tujuan keadilan, yang berarti yang bersalah dihukum. Akhirnya, saya bertumbuh dengan pengertian bahwa ada dua kemungkinan resolusi konflik: rekonsiliasi atau keadilan. Warisan budaya saya lebih menyetengahkan rekonsiliasi dibanding keadilan. Sebab di dalam rekonsiliasi hubungan dipelihara dan kita menghargai relasi lebih daripada kebenaran.<sup>1</sup> Dalam hal ini, rekonsiliasi dipandang berada di luar keadilan.

Tetapi, saya lebih setuju dengan ide Miroslav Volf yang mengemukakan bahwa keadilan adalah “elemen integral” dari rekonsiliasi.<sup>2</sup> Sejalan dengan Volf, Harold Wells menyatakan bahwa “*Reconciliation does not replace justice,*” melainkan “*Reconciliation is the result of justice.*”<sup>3</sup> Dengan merujuk kepada Yeremia 6:14-15, ia menunjukkan bahwa *perdamaian sejati* pada level apapun membutuhkan keadilan.<sup>4</sup> Dalam hal ini Volf menunjuk kepada salib Kristus sebagai dasar rekonsiliasi. Lebih lanjut, ia menyetengahkan ide tentang kehendak untuk menerima (*will to embrace*) sebagai “*terminal point of the*

<sup>1</sup>Bdk. Duane Elmer, *Cross-Cultural Conflict: Building Relationships for Effective Ministry* (Downers Grove: InterVarsity, 1993).

<sup>2</sup>Raymond G. Helmick dan Rodney L. Petersen, eds., *Forgiveness and Reconciliation* (Pennsylvania: Templeton, 2001).

<sup>3</sup>Gregory Baum dan Harold Wells, eds., *The Reconciliation of Peoples: Challenge to the Churches* (New York: Orbis, 1997) 4.

<sup>4</sup>Ibid.

*reconciliation process.*"<sup>5</sup> Yang dimaksudkannya adalah "*that God's reception of hostile humanity into divine communion is a model for how human beings should relate to the other.*"<sup>6</sup> Berdasarkan argumentasi Volf, saya menambahkan bahwa keadilan Allah dan tindakan-Nya untuk merekonsiliasi dunia dengan diri-Nya bertemu di salib Kristus. Allah memberikan anugerah kepada manusia berdosa dengan menghukum Yesus Kristus atas dosa manusia. Oleh karena itu keadilan dan rekonsiliasi betul-betul berjumpa di salib Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan (*embrace*) membutuhkan keadilan, sebab:

*A genuine embrace, an embrace that neither play-acts acceptance nor crushes the other, cannot take place until justice is attended to. Hence the will to embrace includes in itself the will to determine what is just and to name wrong as wrong.*<sup>7</sup>

Sebab itu kebenaran tidak dapat dikesampingkan di dalam upaya rekonsiliasi.

Tetapi Van Zyl Slabbert berpendapat lain. Menurutnya, rekonsiliasi dapat terjadi tanpa kebenaran.<sup>8</sup> Ia menyebut asumsi yang menyatakan bahwa kebenaran akan membawa kepada rekonsiliasi sebagai omong kosong.<sup>9</sup> Ia berargumentasi bahwa "*Many married couples are reconciled precisely because the parties do not want to know or hear about the past.*"<sup>10</sup> Maka dia mendefinisikan rekonsiliasi yang sejati sebagai "*a relationship restored to the extent that the parties can move on in peace while accepting each other's integrity.*"<sup>11</sup> Bagi saya kelihatannya ia sedang berusaha realistis dalam memandang kepada proses rekonsiliasi yang dikerjakan oleh The Red Cross (TRC) di Afrika Selatan. Van Zyl Slabbert menyebut proses yang dikerjakan TRC sebagai proses yang gagal jika seluruh proses dimaksudkan "*to bring truth and reconciliation together,*"<sup>11</sup> tetapi ia juga mengatakan bahwa proses rekonsiliasi tersebut bukanlah suatu kegagalan jika seluruh proses bermaksud untuk membawa kepada pengertian tentang "*where we come from and the direction in which we must move.*"<sup>12</sup>

<sup>5</sup>Ibid. 42.

<sup>6</sup>Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation* (Nashville: Abingdon, 1996) 100.

<sup>7</sup>Helmick dan Petersen, *Forgiveness and Reconciliation* 43.

<sup>8</sup>Wilmot James dan Linda van de Vijver, eds., *After the TRC: Reflections on Truth and Reconciliation in South Africa* (Ohio: Ohio University Press, 2001).

<sup>9</sup>Ibid. 69.

<sup>10</sup>Ibid. 70.

<sup>11</sup>Ibid. [penekanan oleh saya].

<sup>12</sup>Ibid. 71.

Bagi saya definisi Van Zyl Slabbert mengenai rekonsiliasi menarik, sebab ia menekankan satu elemen penting di dalam rekonsiliasi yaitu sikap saling memercayai (*trust*). William J. Long dan Peter Brecke mendefinisikan rekonsiliasi sebagai “*mutually conciliatory accommodation between former antagonists*.”<sup>13</sup> Walter Wink berpendapat bahwa pada dasarnya “*reconciliation is always mutual*.”<sup>14</sup> Unsur saling memercayai di dalam rekonsiliasi berbicara jelas tentang mutualitas ini. Walaupun konsep Wink ditujukan untuk pengampunan mutual antara pihak-pihak yang berseteru tetapi melalui mata Van Zyl Slabbert kita dapat melihat bahwa pengampunan bukanlah satu-satunya mutualitas yang dapat kita pikirkan di dalam rekonsiliasi. Jika kita hendak berjalan di dalam damai bersama-sama, kita harus percaya satu sama lain; percaya bahwa satu sama lain akan sama-sama menginginkan perdamaian yang sama dan kita semua mampu untuk berada di dalam damai, maka dengan demikian kita menjadi manusiawi. Scott R. Appleby menjelaskan arti *Ubuntu* yaitu: “*holds that humanity, the common possession of the entire people, is diminished when even one individual is lost to inhumanity*.”<sup>15</sup> Memercayai satu sama lain bahwa kita mampu berdiam di dalam damai adalah memercayai sifat kemanusiaan kita dan dengan demikian kita memanusiaikan satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam pandangan Van Zyl Slabbert, mengejar kebenaran tidak boleh mengorbankan sikap saling memercayai, atau dengan kata lain, di bawah konsep *Ubuntu*, mengejar kebenaran tidak boleh menonmanusiakan yang bersalah dengan tidak memercayai integritas mereka dan memaksa mereka untuk mengaku secara publik.

Van Zyl Slabbert tidak mengusulkan penghapusan ingatan masa lalu, sebaliknya ia berpendapat bahwa kebenaran masa lalu sangatlah penting.<sup>16</sup> Maka dari itu, usulnya untuk memercayai satu sama lain melengkapi ide Robert J. Schreiter agar korban menceritakan kebenaran.<sup>17</sup> Schreiter berpendapat bahwa rekonsiliasi bukanlah suatu perdamaian yang terburu-buru. Dia menunjukkan kenyataan bahwa sering kali pihak penindas menginginkan cara yang mudah dengan meminta damai tetapi tidak memedulikan penderitaan pihak korban.<sup>18</sup> Ia menyarankan bahwa “*Reconciliation involves a fundamental*

<sup>13</sup>*War and Reconciliation: Reason and Emotion in Conflict Resolution* (Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press, 2003) 1.

<sup>14</sup>*When the Powers Fall: Reconciliation in the Healing of Nations* (Minneapolis: Fortress, 1998) 14.

<sup>15</sup>*The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (Maryland: Rowman & Littlefield, 2000) 199.

<sup>16</sup>James dan van de Vijver, *After the TRC* 71.

<sup>17</sup>*Reconciliation: Mission and Ministry in Changing Social Order* (New York Orbis, 1992) 71.

<sup>18</sup>*Ibid.* 19.

*repair to human lives, especially to the lives of those who have suffered.*"<sup>19</sup> Hal ini hanya bisa dicapai dengan mengetahui kebenaran dan oleh karena itu mengetahui apa yang perlu diperbaiki.

Schreiter juga berargumen bahwa pembebasan (*liberation*) adalah prasyarat rekonsiliasi. Ia menekankan bahwa "*no reconciliation without liberation.*"<sup>20</sup> Baginya pembebasan "*is not just liberation from the violent situation, but also liberation from the structures and processes that permit and promote violence.*"<sup>21</sup> Di sini pembahasan Baum dan Wells mengenai fakta bahwa dosa bukan hanya bersifat pribadi melainkan juga sistemik adalah sangat penting.<sup>22</sup> Mereka menjelaskan bahwa tidaklah cukup hanya memahami dosa pada level pribadi saja, tetapi "*that our personal sinfulness both contributes to and is a result of the sinfulness of our social structures and of a long history and world system of greed and violence.*"<sup>23</sup> Maka, bagi mereka, untuk mencapai rekonsiliasi kita tidak boleh berhenti pada level pribadi saja. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, sistem dunia ini telah menciptakan sebuah jalan yang mengizinkan dan mempromosikan kekerasan (*violence*). Jika kita hendak mencapai rekonsiliasi yang sebenarnya, sistem juga perlu diperbaiki. Maka dari itu orang-orang harus juga dibebaskan dari sistem yang berdosa jika rekonsiliasi hendak dicapai.

Bagi Schreiter, rekonsiliasi tidak boleh dirancukan dengan mediasi konflik (*conflict mediation*). Menurutnya, rekonsiliasi bukanlah suatu keterampilan yang bisa didapatkan tetapi rekonsiliasi adalah lebih kepada sikap. Ia mengatakan bahwa rekonsiliasi akhirnya "*becomes a stance assumed before a broken world rather than a tool to repair that world.*"<sup>24</sup> Saya pikir ia benar. Sering kali rekonsiliasi hanya menjadi sebuah alat untuk menyelesaikan konflik. Tetapi itu seharusnya tidak terjadi, sebab rekonsiliasi seharusnya "*More than a cessation of violence,*" dan oleh karena itu "*involves a fundamental restoration of the human spirit.*"<sup>25</sup> Jika rekonsiliasi hanyalah sebuah alat, maka kita telah terjebak di dalam usaha membuat perdamaian yang terburu-buru. Pengalaman saya ketika saya masih anak-anak secara tepat menunjuk kepada jebakan ini. Kita tidak dididik untuk mengejar kebenaran tetapi justru kita dididik untuk menekan kebenaran demi menjaga damai. Hasilnya adalah kita membiarkan rekonsiliasi yang benar lolos dari tangan kita tepat ketika kita melakukan simbol

<sup>19</sup>Ibid. 21.

<sup>20</sup>Ibid. 22.

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>*The Reconciliation of Peoples.*

<sup>23</sup>Ibid. 8.

<sup>24</sup>*Reconciliation: Mission and Ministry* 26.

<sup>25</sup>Appleby, *The Ambivalence of the Sacred* 203.

rekonsiliasi. Aksi rekonsiliasi yang diajarkan kepada saya ketika saya masih anak-anak justru mengasingkan dan mengisolasi satu sama lain. Inilah yang secara tepat disebut oleh Volf sebagai rekonsiliasi murahan.<sup>26</sup>

## SENI REKONSILIASI

Schreiter menekankan bahwa rekonsiliasi adalah sebuah tujuan yang besar dipandang dari betapa besarnya tugas rekonsiliasi. Ia menyadari bahwa rekonsiliasi sangat sulit untuk dipahami, bukan hanya karena makna dan implikasinya yang sangat dalam tetapi juga karena “*people sometimes seek the wrong things from the wrong people at the wrong time.*”<sup>27</sup> Saya setuju dengan John W. De Gruchy yang memandang rekonsiliasi sebagai suatu seni. Ia menjelaskan dengan tepat:

*As in any art, to do this suggests that there is a discipline that must be mastered, skills that need to be developed, and decisions that must be made. Yet it is important to recognize that there is no formula that if implemented will automatically bring success. The simple reason for this is that there is no such thing as reconciliation in the abstract. If and when it occurs, reconciliation always does so within a particular context and with regard to a particular set of interpersonal or social relations. The dynamics of the process will therefore vary, even though there will also be constants and, while similar it will be different, depending on whether it is at the level of interpersonal or social relations.*<sup>28</sup>

Penelitian David J. Whittaker mengenai delapan contoh dari konflik menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi dalam setiap konflik adalah berbeda, karena situasi konflik yang berbeda-beda.<sup>29</sup> Tetapi, penelitian Long dan Brecke memperlihatkan adanya pola-pola tertentu dalam proses rekonsiliasi yang dapat menghasilkan rekonsiliasi yang sukses atau hanya perdamaian sementara.<sup>30</sup> Menggunakan dua model yaitu model pilihan rasional dan model pengampunan di dalam studi mereka atas sepuluh konflik dan proses rekonsiliasi, mereka menemukan:

<sup>26</sup>Helmick dan Petersen, *Forgiveness and Reconciliation* 34-38.

<sup>27</sup>*Reconciliation: Mission and Ministry* 1.

<sup>28</sup>*Reconciliation: Restoring Justice* (Minneapolis: Fortress, 2002) 153 [penekanan dari saya].

<sup>29</sup>*Conflict and Reconciliation in the Contemporary World* (New York: Routledge, 1999).

<sup>30</sup>War and Reconciliation.

Most important, those countries that reconciled successfully, that is, restored lasting social order, did so through a protracted process of recognition of harm and public truth telling, redefinition of identities and social roles of antagonists, and partial justice short of revenge, not merely through signal sending in a negotiated bargain. *An untidy, seemingly idiosyncratic but undeniably patterned process of national forgiveness was the foundation of successful national reconciliations. The three instances of reconciliations confined to a negotiated bargain—Colombia, Yemen, and Chad—did not lead to long term restoration of peace.*<sup>31</sup>

Mereka menunjukkan fakta bahwa model negosiasi dan pilihan rasional, meski penting dalam proses rekonsiliasi, tidaklah cukup di dalam melahirkan rekonsiliasi. Mereka menyarankan empat langkah di dalam model pengampunan yang pada kenyataannya diperlukan dalam mencapai rekonsiliasi yang sukses: (1) Kesadaran adanya kerusakan dan pengungkapan kebenaran. (2) Pendefinisian ulang kami dan mereka. (3) Keadilan yang bukan balas dendam. (4) Komitmen terhadap suatu relasi yang telah diperbarui tetapi yang berbeda.<sup>32</sup>

Senada dengan Long dan Brecke, De Gruchy di dalam *Reconciliation: Restoring Justice* mengajukan empat tindakan penting dalam seni rekonsiliasi: (1) Menciptakan ruang untuk saling bertemu. (2) Pengungkapan kebenaran. (3) Mendengarkan suara kemarahan. (4) Pengampunan sebagai hikmat dan kekuatan.<sup>33</sup> Mereka semua berbicara tentang membawa kebenaran muncul ke permukaan. Long dan Brecke berargumen agar kebenaran bukan hanya dimunculkan tetapi juga diakui.<sup>32</sup> De Gruchy menunjukkan betapa pentingnya menyediakan ruang sehingga pihak-pihak yang berkonflik dapat betul-betul berhadapan satu sama lain dan akhirnya saling berbicara dan mendengar satu sama lain. Satu penekanan yang saya temukan sangat menarik dari De Gruchy adalah fokusnya kepada mendengarkan suara kemarahan. Ia membuka pintu untuk diskusi tentang balas dendam dengan mengutip Yesaya 59, di mana Tuhan sendirilah yang membalaskan dendam atas ketidakadilan dan kejahatan. Ia berpendapat bahwa dendam bagaimanapun juga memiliki dasarnya, “*for it arises out of the abhorrence of that which is patently evil and a desire to see justice done.*”<sup>35</sup> Tetapi ini tidak berarti bahwa ia mendukung ide pembalasan untuk menghancurkan. Justru dia berargumen bahwa:

<sup>31</sup>Ibid. 65 [penekanan oleh saya].

<sup>32</sup>Ibid. 67-72.

<sup>33</sup>*Reconciliation: Restoring Justice*.

<sup>34</sup>War and Reconciliation 67.

<sup>35</sup>Reconciliation: Restoring Justice 167.

*Acts of vengeance and retribution are the sounds of fury, an expression of righteous anger against those who undermine or destroy human life and social well-being. They reflect a legitimate concern for justice, and thus affirm the biblical understanding of God as the one to whom vengeance ultimately belongs (Deut. 32.35; Rom. 12.19 et al.).*<sup>36</sup>

Ia juga mengingatkan, agar kita bisa memahami sepenuhnya makna keadilan dan pengampunan di dalam rekonsiliasi, kita perlu memprasuposisikan murka Allah atas kejahatan. Baginya, kita hanya dapat mengerti pengampunan dan betul-betul mengampuni jika kita “*truly angered by injustice.*”<sup>36</sup> Akhirnya ia merujuk kepada argumentasi Volf di dalam *The Social Meaning of Reconciliation* dan menyimpulkan bahwa hanya mengejar keadilan akan memimpin kepada dendam yang menghancurkan, demikian juga dengan hanya mengejar rekonsiliasi di luar keadilan hanya akan membiarkan kejahatan merajalela.<sup>38</sup>

Hal yang menggelitik dalam soal pengampunan, bagi saya, adalah kenyataan bahwa sering kali pengampunan ditawarkan sebab permohonan akan keadilan adalah tindakan yang tidak dimungkinkan. Volf berbicara mengenai ketidakmungkinan dilaksanakannya keadilan yang kaku, bahkan walaupun dapat dijalankan sangat diragukan untuk betul-betul dapat dipenuhi.<sup>39</sup> Tetapi bukan hal ini yang mengganggu saya. Banyak penulis tentang rekonsiliasi berbicara mengenai pengampunan sebagai tindakan yang sangat berdaya guna di dalam menyudahi sebuah konflik dan akhirnya membawa rekonsiliasi. Hampir secara otomatis pengampunan adalah jawaban standar untuk segala macam konflik, khususnya bagi orang Kristen. De Gruchy menunjuk kepada argumentasi Gregory Jones yang mengatakan: “*Christians have too often supported forgiveness, love, and forbearance, while failing to acknowledge the moral force of anger, hatred, and vengeance.*”<sup>40</sup>

Berdasar ide kehendak untuk berkuasa, Friedrich Nietzsche menyatakan bahwa orang Yahudi berlaku tidak jujur kepada orang Romawi dan hal itu adalah tanda moralitas yang lemah. Oleh karena itu bagi Nietzsche, karena kondisi orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus adalah di bawah penjajahan orang Romawi maka orang Yahudi berpura-pura berlaku baik hanya karena mereka tidak punya kuasa atas orang Romawi, dan itu bukanlah kebajikan

<sup>36</sup>Ibid. 169.

<sup>37</sup>Ibid.

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>*Forgiveness and Reconciliation.*

<sup>40</sup>*Reconciliation: Restoring Justice* 167.

(*virtue*).<sup>41</sup> Jika kita berupaya untuk menghubungkan argumentasi Nietzsche dengan diskusi kita mengenai pengampunan, maka kita harus betul-betul berhati-hati supaya pengampunan yang ditawarkan adalah sungguh-sungguh murni. Sebab kenyataannya, sering kali para korban mengampuni sebab mereka tidak punya kuasa untuk melampiaskan dendam mereka. Kehendak untuk berkuasa mereka dimanifestasikan ke dalam pengampunan; sebab melalui pengampunan mereka bisa “berkuasa” atas penganiaya mereka. Hasilnya mungkin akan sangat berbeda jika para korban itu diberikan kuasa untuk melampiaskan dendam mereka.

De Gruchy, di sisi yang lain, mengobservasi bahwa pengampunan dapat dimanipulasi dengan mudah oleh pihak penganiaya untuk memberikan tekanan moral kepada pihak korban, supaya pihak penganiaya mendapatkan jalan mudah atas apapun yang telah mereka perbuat atas para korban. Jika hal itu yang terjadi, maka pihak teraniaya telah dijadikan lebih dari sekadar seorang korban ketidakadilan.<sup>42</sup> Berdasar kepada kebenaran bahwa pengampunan adalah satu elemen yang sangat penting di dalam rekonsiliasi dan kenyataan bahwa pengampunan dapat dimanipulasi dengan mudah, baik oleh pihak penganiaya maupun yang dianiaya, maka kita harus betul-betul sangat berhati-hati pada langkah ini. Oleh sebab itu, pengampunan *tidak boleh dipaksakan* baik oleh pihak teraniaya untuk memaafkan ataupun pihak penganiaya untuk menerima pengampunan.

De Chardin mendiskusikan ide mengenai kasih sebagai dasar persatuan.<sup>43</sup> Jika makna rekonsiliasi adalah untuk membawa dua pihak yang berkonflik untuk bersatu, maka kasih harus menjadi dasar rekonsiliasi. Dia percaya bahwa “*Mankind will only find and shape itself if men [sic] can learn to love one another in the very act of drawing closer.*”<sup>44</sup> Deddo, dengan antropologi teologis yang trinitarian sebagai kerangka berpikir, menunjukkan bahwa “*Humanity exists from God, through God, with God and for God.*”<sup>45</sup> Sebab Allah adalah kasih maka kita juga adalah makhluk kasih, sebab kita diciptakan di dalam gambar-Nya. Bagi Deddo, kasih adalah dasar dari relasi tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan dengan pola kasih inilah kita dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain. Myron S. Augsberger mengatakan bahwa

<sup>41</sup>*On the Genealogy of Morals* (trans. by Douglas Smith; New York: Oxford University Press, 1998); bdk. Merold Westphal, *Suspicion and Faith: The Religious Uses of Modern Atheism* (Grand Rapids: Eerdmans, 1993) 251.

<sup>42</sup>*Reconciliation: Restoring Justice* 171.

<sup>43</sup>Jean Maalouf, ed., *Teilhard de Chardin: Reconciliation in Christ* (Selected Spiritual Writings; New York: New City, 2002).

<sup>44</sup>*Ibid.* 128.

<sup>45</sup>Dennis L Okholm, ed., *The Gospel in Black and White: Theological Resources for Racial Reconciliation* (Downers Grove: InterVarsity, 1997) 59.

*“Reconciliation means that God is a God of love more than of law.”<sup>46</sup> Ia menunjukkan bahwa kasih di dalam Tuhan adalah “a relationship of integrity that seeks the best for the other.”<sup>47</sup> Dengan kasih yang seperti inilah persatuan dapat dicapai, sebab di dalam kasih yang sejati terletak belas kasih dan anugerah yang keluar di dalam ekspresi pengampunan dan akhirnya rekonsiliasi.*

Hanya di dalam kasih sejati kita boleh bergerak menuju komitmen bersama atas relasi yang diperbaharui seperti yang diusulkan oleh Long dan Brecke.<sup>48</sup> Ini adalah langkah terakhir di dalam perjalanan rekonsiliasi. Ini adalah latar belakang di mana penerimaan dapat diwujudkan nyata. Volf merangkumkan keseluruhan tindakan penerimaan dengan mengusulkan empat elemen di dalamnya: (1) Membuka tangan. (2) Menunggu. (3) Menutup tangan. (4) Membuka tangan lagi.<sup>49</sup> Dia berpendapat bahwa:

*For embrace to happen, all four must be there and they must follow one another on an unbroken timeline; stopping with the first two (opening the arms and waiting) would abort the embrace, and stopping with the third (closing the arms) would pervert it from an act of love to an act of oppression and, paradoxically, exclusion. The four elements are then the four essential steps of an integrated movement.<sup>50</sup>*

Membuka tangan menunjukkan kemauan untuk mengundang dan menjangkau dan mengikutsertakan mereka di dalam bagian identitas diri kita. Demikian sebaliknya, tangan yang terbuka menunggu untuk pihak yang lain membuka tangan mereka juga secara sukarela. Menunggu adalah satu tindakan untuk tidak memaksa pihak lain berespons sesuai dengan keinginan kita, tetapi justru membiarkan mereka untuk mencapai integritas mereka sendiri. Di sinilah sikap saling memercayai memainkan peran yang sangat penting. Menutup tangan berarti bahwa kedua belah pihak saling menerima dan diterima oleh satu sama lain. Penerimaan harus mutual. Inilah yang disebut oleh Volf sebagai tujuan penerimaan.<sup>51</sup> Tetapi hal ini tidaklah berhenti di sini, melainkan tangan seharusnya membuka kembali setelah itu. Ini adalah tindakan menghormati identitas satu sama lain dan menerima perbedaan masing-masing. Volf mempertahankan bahwa di dalam tindakan penerimaan, semua empat

<sup>46</sup>*The Robe of God: Reconciliation, the Believers Church Essential* (Ontario: Herald, 2000) 214.

<sup>47</sup>*Ibid.* 215.

<sup>48</sup>*War and Reconciliation.*

<sup>49</sup>*Exclusion and Embrace.*

<sup>50</sup>*Ibid.* 141.

<sup>51</sup>*Ibid.* 143.

elemennya adalah melingkar. Oleh sebab itu saya mengakui bahwa proses rekonsiliasi, yaitu penerimaan, tidak boleh dilewatkan hanya demi mencapai perdamaian. Pengalaman rekonsiliasi saya ketika saya masih kecil adalah melewatkan semua proses tersebut demi “memelihara” perdamaian. Jabat tangan atau merangkul yang saya lakukan sebagai proses rekonsiliasi ketika saya masih kecil dipenuhi oleh kemarahan, penolakan, dan ketidakrelaan, dan oleh karenanya mengkhianati inti terdalam dari proses rekonsiliasi yang sejati.

## MEMIKIRKAN ULANG KONSEP AKSI TANPA KEKERASAN

Da Silva mengambil pikiran Gandhi mengenai *ahimsa*, yang biasanya diterjemahkan sebagai tanpa kekerasan dan menjelaskan arti sesungguhnya dengan mengutip Bondurant yang mengatakan bahwa *ahimsa* berarti “*action based on the refusal to do harm.*”<sup>52</sup> Bagi Da Silva, *ahimsa* tidaklah pasif, melainkan tindakan aktif untuk tidak menyakiti. Untuk menjelaskan lebih jauh, ia mengutip Gandhi: “*Nonviolence is the greatest and most active force in the world. One cannot be passively nonviolent.*”<sup>53</sup> Dunia sudah menyaksikan kekuatan tanpa kekerasan melalui Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Desmond Tutu, dan orang-orang lain yang mengikuti langkah mereka. Dari nama teragung yang selalu kita rujuk sebagai orang Kristen, Yesus Kristus, kita belajar pelajaran tanpa kekerasan. Pengajaran pertama dari Alkitab yang sangat menyentuh saya adalah panggilan untuk memberikan pipi yang lainnya ketika seseorang menampar pipi kita (bdk. Mat. 5:38-42). Pengajaran ini sederhana tetapi sangat sulit dilaksanakan.

Wells mengundang pembacanya untuk merenungkan tindakan Tuhan Yesus ketika Dia ada di dunia.<sup>54</sup> Dengan mengutip Matius 5:39, ia menggarisbawahi bahwa “*nonviolent action is far preferable.*”<sup>55</sup> Ia akhirnya mengatakan bahwa orang Kristen cenderung melupakan ajaran Tuhan Yesus mengenai tanpa kekerasan dengan terburu-buru mengambil solusi kekerasan. Akan tetapi ia mengingatkan bahwa kadang kala strategi tanpa kekerasan juga menyakiti orang. Ia membahasnya lebih jauh:

*Sometimes love of the enemy requires precisely that the enemy be effectively resisted. Sometimes, I believe, the armed and “violent” activities of defenders, peacekeepers, police, or revolutionaries have to be*

<sup>52</sup>*Forgiveness and Reconciliation* 309.

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*The Reconciliation of Peoples.*

<sup>55</sup>*Ibid.* 6.

*supported. What must be seen together with Jesus' radical teaching about forgiveness and the love of enemies is that he does not flee from confrontation or gloss over painful conflict.*<sup>56</sup>

Kenyataannya adalah bahwa Tuhan Yesus tidak selalu menggunakan tindakan tanpa kekerasan ketika menghadapi konflik. Wells menunjukkan beberapa kisah di dalam kitab Injil ketika Tuhan Yesus bertindak dan bahkan mendukung tindakan “kekerasan” untuk menolak kejahatan.<sup>57</sup> Tuhan Yesus melakukan “pembersihan” Bait Allah di Yerusalem dengan menggunakan cambuk dan Dia juga mengatakan bahwa Dia datang ke dunia bukan membawa kedamaian melainkan membawa pedang. Apa yang perlu dipelajari dari Tuhan Yesus adalah: tindakan tanpa kekerasan tidak selalu merupakan langkah yang tepat di dalam menghadapi segala macam konflik. Ada waktunya kita perlu untuk mengambil tindakan tanpa kekerasan, tetapi ada waktunya pula ketika tindakan “kekerasan” diperlukan. Adalah bijaksana untuk kita tidak terburu-buru mengambil tindakan tanpa kekerasan untuk semua macam konflik, demikian juga adalah bijak jika kita tidak terburu-buru mengambil langkah “kekerasan” untuk segala macam konflik. Dasar dari semua tindakan kita terhadap konflik, seperti yang diusulkan oleh Wells, adalah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa dan pikiran, serta mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri (Mat. 22:37-40). Ia berargumentasi bahwa hukum yang terutama yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus “*cannot be formulated into rigid principles.*”<sup>58</sup> Maka dari itu saya percaya bahwa hikmat dan pengertian sangat diperlukan di sini.

## KEMUNGKINAN REKONSILIASI ANTARA ORANG TIONGHOA DAN JAWA DI INDONESIA

Ada perbedaan yang sangat besar antara mengetahui konsep rekonsiliasi dengan menjalaninya di dalam pengalaman yang real. Pengalaman saya sendiri sebagai orang keturunan Tionghoa yang hidup di Indonesia bersama-sama dengan orang asli Indonesia, khususnya orang Jawa, memperlihatkan betapa mengerikannya konflik rasial yang pada satu titik tertentu membuat saya merasa usaha mengejar rekonsiliasi adalah sia-sia belaka. Kita, orang Tionghoa dan Jawa, sudah tinggal bersama-sama di Indonesia lebih dari tiga ratus tahun lamanya. Kita sudah memahami cara hidup satu sama lain dan sudah

<sup>56</sup>Ibid.

<sup>57</sup>Ibid. 7.

<sup>58</sup>Ibid. 6.

mengembangkan rasa saling menghargai. Tetapi sedihnya sejarah mencatat adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan satu terhadap yang lain. Yang saya temukan hilang adalah sikap saling memercayai. Rasa saling tidak percaya ini menciptakan jalan untuk ketidakjujuran dan kebohongan, yang akhirnya menjadi sikap yang kita ambil satu terhadap yang lain. Menggunakan kata-kata Volf, kita cenderung untuk menyingkirkan daripada menerima satu sama lain. Kita seakan lebih suka mempraktikkan kehendak untuk berkuasa, usulan Nietzsche, daripada kehendak untuk menerima yang diusulkan oleh Volf. Oleh karena itu, bahkan tindakan kita untuk berekonsiliasi pun digerakkan oleh sikap menyingkirkan dan kehendak untuk berkuasa.

Kita tidak memiliki dokumentasi tertulis tentang kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana permusuhan antara orang Tionghoa dan Jawa mulai muncul. Tetapi cerita tentangnya diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi. Dari sisi orang Tionghoa, dipercayai bahwa permusuhan mulai muncul ketika penjajah Belanda menciptakan kelas-kelas di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Belanda menjajah Indonesia selama tiga ratus lima puluh tahun mulai kira-kira pertengahan tahun 1500-an sampai pertengahan 1900-an. Entah bagaimana di tengah-tengah masa itu, orang asli Indonesia ditentukan menjadi kelas terbawah dan orang Tionghoa menjadi kelas kedua di antara orang Belanda dan orang asli Indonesia. Orang asli Indonesia oleh karenanya dipermalukan di tanah airnya sendiri. Mereka marah kepada Belanda dan membawa kemarahan dan dendam mereka juga kepada orang Tionghoa. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, dendam orang asli terhadap warga keturunan Tionghoa sudah mulai mengintip di balik pintu. Antara tahun 1945 dan 2003, ada banyak hal yang mengerikan terjadi terhadap orang Tionghoa di Indonesia. Dua di antaranya sangat besar, tetapi tidaklah benar-benar dipublikasikan maupun diakui.

Yang *pertama* adalah di pertengahan tahun 1960-an. Di tengah-tengah kekacauan politik di tahun 1965, kebencian terhadap Tionghoa menumpuk cepat karena diisukan bahwa orang Tionghoa di Indonesia mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI ditemukan melakukan tindakan kudeta militer dengan membunuh tujuh Jendral militer Indonesia. Pada masa itu ada muncul slogan “Ganyang Cina.” Banyak orang Tionghoa yang keluar dari Indonesia untuk menyelamatkan diri mereka. Apa yang sesungguhnya terjadi pada masa itu tidak pernah betul-betul diungkapkan, tetapi orang tua saya mengisahkan bahwa masa itu sangatlah mengerikan.

Yang *kedua*, tragedi Mei tahun 1998 yang meledak dengan pembakaran rumah orang-orang Tionghoa, pemerkosaan gadis-gadis Tionghoa, dan pembunuhan orang-orang Tionghoa di Jakarta. Pemerintah Indonesia tetap

<sup>59</sup>Tentang tragedy ini, lih. “May 1998 Riots,” [http://www.fica.org/cs/may\\_1998\\_riots?DokuWiki=72232eaf65e305205656a782150ddb9b](http://www.fica.org/cs/may_1998_riots?DokuWiki=72232eaf65e305205656a782150ddb9b)

menyangkal kebenarannya di tengah-tengah membanjirnya laporan-laporan yang mengonfirmasi kejadian tersebut. Untuk tragedi ini keadilan tidak pernah dijalankan. Peristiwa ini lewat begitu saja tanpa investigasi lebih lanjut oleh pemerintah. Bagi saya, tindakan pemerintah itu seperti mengusulkan kepada para korban untuk melupakan saja apa yang terjadi. Lebih jauh lagi, bagi saya, praktik rekonsiliasi seperti yang diajarkan kepada saya waktu saya masih anak-anak adalah metode yang disukai oleh pemerintah. Korban dan penganiaya haruslah meletakkan masa lalu di belakang (bahkan tanpa pengakuan akan kebenaran yang terjadi di masa lalu) dan lalu diharapkan untuk berjabat tangan dan akhirnya berekonsiliasi. Dengan kata lain, praktik yang di-"usul"-kan ini mengatakan bahwa kebenaran dan proses rekonsiliasi tidaklah penting sama sekali sehingga dapat dilewatkan begitu saja. Lebih dalam lagi, praktek ini menyatakan bahwa harga diri korban tidaklah penting dan satu-satunya hal yang penting adalah "damai" (damai yang palsu menurut saya dan oleh karenanya rekonsiliasi yang palsu pula).

Dalam situasi seperti ini, saya lebih setuju agar keadilan diperlihatkan lebih dulu daripada rekonsiliasi. Menurut studi dari Long dan Brecke,<sup>60</sup> langkah awal adalah pengakuan akan apa yang menyakitkan dan penyampaian kebenaran. Saya pikir mereka benar, sebelum rekonsiliasi dapat dicapai, pemerintah Indonesia harus membuka dan mengakui kebenaran yang ada. Saya tidak berpikir bahwa pengakuan secara publik diperlukan dalam hal ini, sebab budaya menyelamatkan muka di Indonesia<sup>61</sup> dan juga karena faktor saling memercayai seperti yang diusulkan oleh Van Zyl Slabbert.<sup>62</sup> Sesungguhnya pada langkah kedua, saya lebih setuju supaya yang bersalah dihukum, yaitu dengan menggunakan bahasa Long and Brecke: keadilan tanpa balas dendam, tetapi untuk kasus ini adalah sangat sulit sekali untuk betul-betul menginvestigasi siapa yang melakukan apa. Karena itu mungkin lebih baik jika tidak menuntut keadilan yang aktual untuk dilaksanakan di sini. Akan tetapi, sebagai penggantinya saya akan mengusulkan apa yang dikatakan oleh De Gruchy mengenai mendengarkan suara kemarahan<sup>63</sup> untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dalam budaya menyelamatkan muka seperti Indonesia, saya tidak ingin korban untuk maju dan menceritakan kisah mereka secara publik, sebab itu hanya akan membuka aib mereka dan oleh karenanya hanya membuat mereka makin dipermalukan saja. Melainkan saya justru hendak mengusulkan supaya mereka menuliskan kisah dan kemarahan mereka secara anonim dan biarkan tulisan itu dibaca secara publik oleh pemimpin yang dihormati oleh rakyat

<sup>60</sup>War and Reconciliation.

<sup>61</sup>Bdk. Elmer, *Cross-Cultural Conflict*.

<sup>62</sup>James dan van de Vijver, *After the TRC*.

<sup>63</sup>*Reconciliation: Restoring Justice*.

Indonesia. Dua langkah ini dimaksudkan untuk mengonfrontasi kejahatan dan menamai kejahatan sebagai kejahatan dan untuk menunjukkan bahwa kejahatan adalah buruk dan layak untuk dihukum.

Langkah berikutnya adalah langkah yang paling sulit untuk dikerjakan, yaitu pengampunan. Tetapi saya tidak akan pernah memaksa korban untuk melakukannya, sebab tujuan akhirnya adalah untuk pengampunan yang murni. Seperti yang telah kita ketahui, pengampunan dapat dengan mudah dimanipulasi baik oleh korban maupun oleh pihak penganiaya. Langkah ini perlu dilaksanakan dengan hati-hati. Hal ini sangat sulit sebab yang menjadi dasarnya haruslah kehendak untuk menerima dan bukan kehendak untuk berkuasa. Sangat sulit mengubah kecenderungan sikap kita dari menyingkirkan kepada menerima, sebab perubahan sikap itu membutuhkan kesadaran akan kasih yang sejati. Hal ini bahkan lebih sulit bagi orang Tionghoa sebab mereka tidak pernah merasakan apakah itu keadilan dalam rupa bagaimanapun di Indonesia. Tetapi diharapkan, dua langkah awal tadi, jika dilaksanakan dengan tepat, akan dapat membuka jalan untuk pengampunan. Tindakan pengampunan dapat dilaksanakan dengan jauh lebih baik, menurut saya, jika seorang pemimpin yang dihormati dari kalangan orang Jawa menjadi wakil untuk menyatakan permohonan maaf atas apapun yang pernah dilakukan oleh orang Jawa terhadap orang Tionghoa. Budaya malu seharusnya “melarang” tindakan ini, tetapi jika dilihat dari fakta bahwa orang Tionghoa dan Jawa telah lama hidup bersama di dalam komunitas yang sama maka saya pikir hal ini dapat dijalankan. Jika ini benar-benar dapat dilaksanakan, maka saya percaya bahwa pengampunan yang murni dan otentik dapat terjadi dengan lebih mudah. Tetapi saya harus mengingatkan tindakan memohon maaf bukanlah prasyarat untuk pengampunan yang murni dapat muncul dan juga permohonan maaf ini tidaklah boleh dipaksakan.

Langkah terakhir, adalah komitmen terhadap relasi yang diperbarui dan juga yang berbeda.<sup>64</sup> Ilustrasi yang terbaik untuk komitmen ini ada pada penjelasan Volf akan empat langkah menerima.<sup>65</sup> Diperlengkapi dengan kehendak untuk menerima yang memiliki dasarnya pada kasih sejati, tindakan penerimaan (membuka tangan, menunggu, menutup tangan, dan membuka tangan lagi) dapat mengambil tempatnya. Di sini jabat tangan atau pelukan adalah tindakan yang murni dan otentik dan akhirnya betul-betul menyimbolkan rekonsiliasi yang sebenarnya. Hanya dengan beginilah masa lalu dapat ditaruh di belakang dan di masa kini perjanjian yang baru dapat dibentuk demi mencapai hidup yang sungguh-sungguh damai di masa yang akan datang. Praktik rekonsiliasi ini, yaitu di dalam penerimaan, perlu dilakukan terus

<sup>64</sup>Long dan Brecke, *War and Reconciliation*.

<sup>65</sup>*Exclusion and Embrace*.

menerus oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, kita juga perlu realistis bahwa proses rekonsiliasi ini sangat mungkin sekali akan membutuhkan waktu yang lama pada kenyataannya. Oleh sebab itu kita perlu untuk bersabar jika kita memang hendak mengejar rekonsiliasi.<sup>66</sup>

Pengalaman saya ketika saya masih anak-anak dan praktik rekonsiliasi yang dilakukan selama ini di Indonesia menunjukkan bahwa sebetulnya rekonsiliasi sejati tidak pernah betul-betul terjadi. Sedihnya, hal ini menumpuk kemarahan, kebencian, penolakan, dan penyingkiran, sehingga kita saling tidak memaanusiakan satu sama lain. Di sini konsep Ubuntu perlu direnungkan lagi. Lebih jauh lagi, kita perlu merefleksikan kebenaran bahwa kita ini diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, Allah yang adalah kasih. Maka jalan hidup yang kita harus laksanakan adalah jalan kasih. Marilah kita diingatkan lagi akan hukum terutama yaitu mengasihi Allah dan sesama (Mat. 22:37-40). Pada akhirnya, sikap kita pada sesama kita haruslah dimulai dari kasih.

<sup>66</sup>Whittaker, *Conflict and Reconciliation* 9.